



**PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

JALAN H. M. KAMEL NO. 18 TELP. (0745) 91754 SAROLANGUN

---

**TELAAHAN STAF**

Kepada : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Dari : Staf Bidang Bina Program  
Tanggal : 11 Juni 2021  
Nomor :  
Lampiran : -  
Hal : Usulan Pengadaan aplikasi atau web yang memuat informasi tata ruang dan penerbitan rekomendasi kesesuaian tata ruang

**I. Persoalan**

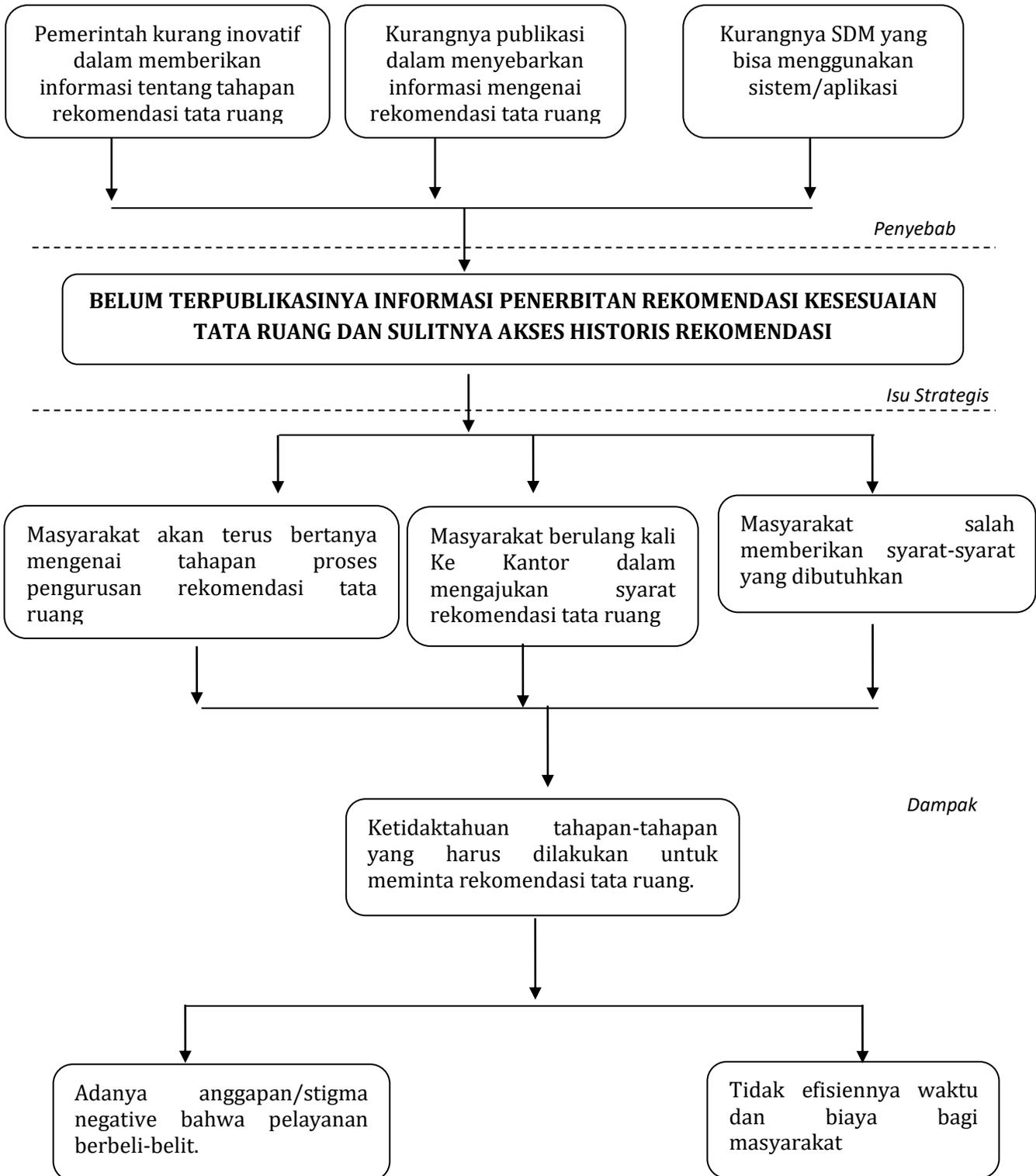
Publikasi dan pelaksanaan alur permohonan rekomendasi kesesuaian tata ruang belum berjalan dengan baik, hal itu terjadi dikarenakan tidak tersedianya informasi bagan alur yang terbuka dan dapat di akses oleh masyarakat luas. Faktanya, di Dinas Pupr sendiri belum terdapat papan informasi atau media untuk menyajikan informasi yang bisa dibaca/ dilihat oleh masyarakat umum. Informasi-informasi mengenai pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah jadi kurang dipahami oleh masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan ketidaktahuan masyarakat akan alur yang harus dilakukan dalam mendapatkan rekomendasi tata ruang. Sehingga pada akhirnya muncul stigma negatif dari masyarakat bahwa proses rekomendasi yang berbelit-belit dan lama. Selain itu untuk pelaksanaan alur permohonan kurang efektif karena dilakukan secara manual dan tidak tersimpan serta sulitnya akses dokumen lama setelah rekomendasi tersebut dikeluarkan. Hal ini menyebabkan lamanya untuk mengakses dokumen rekomendasi yang sudah dikeluarkan sehingga untuk melihat data berapa jumlah atau presentase dokumen rekomendasi kesesuaian tata ruang belum bisa dilakukan.

## **II. Fakta-fakta yang mempengaruhi**

Dalam hal tersebut tersebut, fakta-fakta yang mempengaruhi yaitu :

- Belum optimalnya dalam memberikan informasi tentang tahapan rekomendasi kesesuaian tata ruang
- Kurangnya publikasi dalam menyebarkan informasi mengenai rekomendasi kesesuaian tata ruang
- Kurangnya SDM yang bisa menggunakan sistem/aplikasi
- Sulitnya akses dokumen rekomendasi yang sudah pernah dikeluarkan
- Tidak ada penyimpanan yang sistematis dan mudah di akses

### III. Analisis



#### **IV. Kesimpulan**

Pengusulan aplikasi / web informasi tata ruang dan penerbitan rekomendasi tata ruang guna menunjang efektifitas dan efisiensi pelayanan masyarakat.

#### **V. Saran**

**Disarankan kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sarolangun :** Bila Bapak Kepala Dinas berkenan membuatkan sistem dalam bentuk aplikasi/ web tentang penerbitan rekomendasi kesesuaian tata ruang yang memuat :

1. Pemasukan dokumen permohonan penerbitan rekomendasi kesesuaian tata ruang
2. Fitur keluaran surat permohonan yang sudah terorganisir dan otomatis dengan hanya memasukkan nama pemohon, perihal permohonan sehingga langsung berbentuk surat permohonan yang siap sehingga memangkas waktu untuk proses awal.
3. Fitur penyimpanan dalam aplikasi mengenai data rekomendasi kesesuaian tata ruang yang sudah ada sehingga mudah di akses atau diketahui histori dari lokasi tersebut dalam hal pengeluaran rekomendasi kesesuaian tata ruangnya

Demikian disampaikan untuk diketahui, mohon arahan dan persetujuan bapak Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sarolangu, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

STAF BIDANG BINA PROGRAM

**Dwitiya Yuni Lestari, ST**

Penata Muda

NIP. 19921224 202012 2 009

## **Tugas 2**

Tindakan yang dilakukan selaku atasan dari staf/ bawahan yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas selama 11 hari berturut-turut yaitu :

1. Pada saat bawahan tersebut tidak masuk kerja selama 5 hari kerja, saya melakukan hukuman disiplin dengan teguran lisan dan menanyakan alasan mengapa tidak masuk kerja melalui telfon atau sms atau via chat whatsapp kepada yang bersangkutan. Hal tersebut tertera pada Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 pasal 7 (4) b,c,d,e mengenai pejabat yang berwenang mengukum berlaku rumus one step down untuk jenis hukuman ringan.
2. Jika teguran lisan tidak diindahkan oleh bawahan tersebut maka saya membuat teguran tertulis kepada bawahan yang bersangkutan
3. Yang terakhir saya menindak tegas maka saya membuat pernyataan tidak puas secara tertulis bagi bawahan tersebut setelah hari ke 11 tidak ada alasan yang jelas mengenai tidak masuk kerja.